



Tanggal	21 Februari 2024	Media	Haluan
Kategori	KEAMANAN, HUKUM & POLITIK	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Satu TPS di Kota Pariaman Bakal Lakukan Pemungutan Suara Ulang

KLIPING KORAN

HARI : Pabu

TANGGAL : 21 Februari 2024

PARIAMAN, HALUAN - Satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Pariaman akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), Sabtu (24/2) mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi pengawasan terhadap proses penghitungan. Dari hasil pengawasan yang dihimpun, ditemukan satu TPS yang memiliki potensi pemungutan suara ulang (PSU).

"Kemarin kita melakukan identifikasi pengawasan proses penghitungan. Kemudian kami menghimpun hasil pengawasan di setiap TPS, dari sana ditemukan adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu TPS karena ada warga yang memilih tapi tidak memiliki KTP berdomisili daerah setempat," katanya, Senin (19/2).

Ia menjelaskan, kartu tanda penduduk (KTP) pemilih khusus yang melakukan pencoblosan di salah satu TPS tersebut tidak berdomisili di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, suara yang masuk dianggap tidak sah sehingga harus dilakukan pemungutan ulang.

"Berdasarkan identifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan pengawas kita, ini sudah masuk ke dalam syarat harus dilakukannya PSU. Kemarin kami sudah menyampaikan temuan tersebut kepada KPU serta sudah dilakukan tindak lanjut," jelasnya.

Adapun KPU Kota Pariaman sudah mengeluarkan jadwal PSU, yaitu pada 24 Februari 2023 untuk TPS 3 Desa Naras Hilir. Pemungutan ulang dilakukan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, Ketua PPK Pariaman Utara, Rusdi juga mengatakan demikian. Katanya, potensi PSU diketahui oleh pihaknya pada Jumat malam, dua hari setelah proses pemungutan suara berlangsung.

"Kami dari PPK tahunya pada Jumat malam sekitar pukul 22.00 WIB tentang potensi PSU di TPS 3 Desa Naras Hilir. Berangkat dari sana, kami memanggil jajaran PPS untuk rapat koordinasi di aula kantor camat," ujarnya.

Ia menyebut, PSU harus dilakukan karena ada pemilih khusus yang memiliki KTP domisili di Bogor. Kekeliruan terjadi saat hari pemungutan suara, karena anggota KPPS yang bertugas membolehkan pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS Naras Hilir.

"Waktu itu, KPPS menerima surat suara presiden dan wakil pemilih ini untuk mencoblos surat suara presiden dan wakil presiden. Pihak KPPS menyadari kekeliruan tersebut pada hari Jumat malam itu," jelasnya.

Rusdi mengatakan, anggota KPPS pada TPS 3 Desa Naras Hilir tetap bertugas pada PSU sesuai jadwal dari KPU Kota Pariaman. Begitu juga dengan pengawas TPS dan para saksi akan bekerja kembali pada 24 Februari mendatang.

Sementara itu, untuk daftar pemilih baik itu daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb), pihak penyelenggara akan mengeluarkan surat pemberitahuan kembali sekitar tiga hari sebelum PSU. (h/mta)

PEMILU 2024 - Suasana pemungutan suara di TPS Kota Pariaman, Sabtu (14/2) MTA

73



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	21 Februari 2024	Media	Haluan
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

KLIPING KORAN

HARI : Pabu

TANGGAL : 21 Februari 2024

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tekan Angka Kemiskinan, Pemko Lakukan Berbagai Langkah Strategis

PARIAMAN, HALUAN - Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman pada tahun 2023, angka kemiskinan daerah tersebut mencapai 4,20 persen. Nilai ini disebut naik dari tahun sebelumnya, yaitu 4,13 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman, Hendri mengatakan, penyebab naiknya angka kemiskinan karena beberapa faktor. Salah satunya adalah dampak pandemi Covid-19 yang mem-

engaruhi tingkat kunjungan wisatawan ke daerah tersebut.

"Selain itu, adanya transformasi dari era konvensional ke digital juga memiliki dampak yang cukup pada kenaikan angka kemiskinan. Masyarakat dituntut beradaptasi dengan kehidupan yang serba digital," katanya.

Kendati begitu, Kota Pariaman pada tahun ini akan menggenjot kembali penurunan persentase angka kemiskinan tersebut. Hendri menyebut, untuk tahun 2024 target penek-

nan angka kemiskinan di Kota Pariaman adalah 4,08 persen.

Katanya, pemko sudah merencanakan berbagai kegiatan dan sejumlah program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Hal pertama yang kami lakukan adalah mengurangi beban masyarakat miskin. Pemko berkomitmen tetap memberikan biaya kesehatan dan pendidikan gratis," ulasnya.

Hendri menerangkan, beban biaya kesehatan dan pendidikan merupakan langkah

strategis membantu meringankan masyarakat miskin. Peranan pemerintah dalam dua sektor tersebut sangat memengaruhi kehidupan masyarakatnya.

"Makanya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah kota Pariaman giat menggratiskan biaya pendidikan siswa sampai tingkat sekolah menengah atas. Saat ini, bahkan sudah ada program Saga Saja yang membantu tamatan SMA sederajat dari keluarga kurang mampu untuk berkuliah," katanya.

"Sementara itu untuk ke-

butuhan pangan dan sembako, Pemko Pariaman juga akan memberi bantuan kepada warga miskin. Begitu juga dengan perluasan lapangan pekerjaan serta melaksanakan berbagai pelatihan untuk masyarakat usia produktif," katanya.

Kota Pariaman, katanya, akan memaksimalkan lapangan pekerjaan lewat kerja sama dengan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah tetapi juga melibatkan pihak swasta.

"Untuk memaksimalkan peningkatan perekonomian

masyarakat, pemko memerlukan investor. Maka dari itu, pemko akan menciptakan iklim investasi yang layak salah satunya dari sektor pariwisata dan perdagangan serta jasa," jelasnya.

Hendri menyebut, pemko tengah membuat kajian perencanaan investasi Kota Pariaman. Selain itu, rehabilitasi kawasan miskin melalui perbaikan rumah, jalan, drenase dan sanitasi juga masuk ke dalam salah satu upaya menekan angka kemiskinan tersebut. (h/mta)

